

# PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

## LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 September Tahun 2020  
UAPPA-W Maluku BA-005.01

Jl.KebunCengkeh Batu Merah Atas  
Ambo n-Maluku97128  
Telp.0911341171 Fax.0911 355296  
e-mail:korwil.[maluku@gmail.com](mailto:maluku@gmail.com)



**LAPOR AN KEU AN GAN**  
**UNIT AKU NT ASI PEMBANT U PENGGU NA ANGG ARAN**  
**WILA YAH MALUKU**  
**PENGADI LA N TINGGI AGAM A AM BON**

**Un tu k Period e yang Berakh ir 30 September 20 20**

**BA GIAN AN GG ARAN 00 5.0 1**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**M AHKA MAH AGU NG REPUBLIK IN DO NESIA**

**Jl. Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas**

**Tel p.0911 341171 Fax .0911 355296**

**Ambon -Maluku 97128**

**e - m a il: korwil.maluku@gmail.com**

## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01 adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 27 Juli 2020  
Sekretaris PTA Ambon  
Selaku Kepala UAPPA-W Maluku BA.005-01



Ismail Difinubun, S.Ag. MH  
NIP. 19690201 200112 1 002

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	10
A. Profil dan Kebijakan Teknis UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	21
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	36
F. Pengungkapan Pengungkapan Lainnya	37
Lampiran Laporan Keuangan UAPPA Wilayah Maluku	

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

### **UAPPA WILAYAH MALUKU BA. 005-01**

#### ***PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON***

*Jl. Kebun Cengkeh Batu Merah Atas Ambon  
TELEPON 0911 341171, FAXIMILE 0911 355296  
Email : keuangan.ptaambon@gmail.com*

---

### **PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan Keuangan UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01 yang terdiri dari: (a)Laporan Realisasi Anggaran, (b)Neraca, (c)Laporan Operasional, (d)Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e)Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode berakhir 30 September Tahun 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 06 Oktober 2020  
Sekretaris PTA Ambon  
Selaku Kepala UAPPA-W Maluku BA.005-01



Ismail Difin Abun, S.Ag. MH  
NIP. 19690201 200112 1 002

## RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01 Semester I TA. 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada periode berakhir 30 September 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 182.101.855 atau mencapai 156,84 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp116.106.130.

Realisasi Belanja Negara pada periode berakhir 30 September 2020 adalah sebesar Rp76.019.071.188 atau mencapai 69,92 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp108.715.273.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 September 2020. Nilai Aset dicatat dan disajikan sebesar Rp273.268.027.236 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp508.678.700; Aset Tetap (neto) sebesar Rp271.777.457.708; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp981.890.828. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp492.071.000 dan Rp272.776.584.136.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 September 2020 adalah sebesar Rp131.474.680, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp78.754.499.122 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp78.623.024.442. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp98.994.222 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp78.524.030.220.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas periode pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp275.473.598.168 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp78.524.030.220 ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp75.836.969.313 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 September 2020 adalah senilai Rp272.776.584.136.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

## I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### UAPPA WILAYAH MALUKU BA. 005-01 LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2020		% thd Angg	TA 2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>	<b>B.1</b>				
Penerimaan Negara Bukan Pajak		116.106.130	182.101.855	156,84	212.558.204
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>116.106.130</b>	<b>182.101.855</b>	<b>156,84</b>	<b>212.558.204</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.2.1	81.693.269.000	59.448.860.695	72,77	57.488.339.484
Belanja Barang	B.2.2	24.839.004.000	15.307.419.373	61,63	11.208.962.868
Belanja Modal	B.2.3	2.183.000.000	1.262.791.100	57,85	8.425.623.290
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>108.715.273.000</b>	<b>76.019.071.168</b>	<b>69,92</b>	<b>77.122.925.642</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## II. NERACA

### UAPPA WILAYAH MALUKU BA. 005-01 NERACA PER 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	492.071.000	3.639.204
Persediaan	C.2	16.607.700	10.099.900
Persediaan yang Belum Diregister		962.900	-
Jumlah Aset Lancar		<b>508.678.700</b>	<b>13.739.104</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.3	88.118.763.000	88.118.763.000
Peralatan dan Mesin	C.4	40.570.514.946	40.659.083.878
Gedung dan Bangunan	C.5	193.010.284.842	193.010.284.842
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.6	1.048.400.900	1.048.400.900
Aset Tetap Lainnya	C.7	420.045.533	420.045.533
Konstruksi dalam pengerjaan	C.8	500.331.100	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.9	(51.890.882.613)	(48.199.884.179)
Jumlah Aset Tetap		<b>271.777.457.708</b>	<b>275.056.693.974</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.10	73.500.000	73.500.000
Aset Lain-Lain	C.11	3.112.724.080	2.828.683.114
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.12	(2.204.333.252)	(1.404.822.596)
Jumlah Aset Lainnya		981.890.828	1.497.360.518
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>273.268.027.236</b>	<b>276.567.793.596</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.14	335.000	497.132.224
Pendapatan diterima dimuka	C.14	-	47.424.000
Uang Muka di KPPN	C.15	492.071.000	3.639.204
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		<b>492.406.000</b>	<b>548.195.428</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>492.406.000</b>	<b>548.195.428</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.16	272.776.584.136	275.473.598.168
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>272.776.584.136</b>	<b>275.473.598.168</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>273.268.990.136</b>	<b>276.021.793.596</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**UAPPA WILAYAH MALUKU BA. 005-01**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	131.474.680	187.740.684
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>131.474.680</b>	<b>187.740.684</b>
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>			
Beban Pegawai	D.2	59.228.947.856	57.359.919.899
Beban Persediaan	D.3	784.545.125	695.175.759
Beban Barang dan Jasa	D.4	9.273.084.231	6.268.614.780
Beban Pemeliharaan	D.5	3.916.915.994	2.737.484.954
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.049.461.985	1.356.295.588
Beban Barang untuk Diserahkan kepada		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	4.501.543.931	3.814.702.090
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>78.754.499.122</b>	<b>72.232.193.070</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(78.623.024.442)</b>	<b>(72.044.452.386)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Nonlancar		361.000	(82.010.403)
Pendapatan Pelepasan Aset Nonlancar		361.000	7.409.000
Beban Pelepasan Aset Nonlancar		-	89.419.403
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		98.633.222	25.999.040
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional		101.710.975	37.640.197
Beban dari Kegiatan Non Operasional		3.077.753	11.641.157
<b>JUMLAH SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>98.994.222</b>	<b>(56.011.363)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(78.524.030.220)</b>	<b>(72.100.463.749)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
Pendapatan PNBPN		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(78.524.030.220)</b>	<b>(72.100.463.749)</b>

**Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan**

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### UAPPA WILAYAH MALUKU BA. 005-01 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2020 DAN 2019

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	2020	2019
<b>EKUITAS AWAL</b>	E.1	275.473.598.168	281.938.673.633
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	<b>(78.524.030.220)</b>	<b>(72.100.463.749)</b>
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		(9.953.125)	(2.406.936)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		(9.953.125)	(7.961.200)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3	-	5.554.264
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	75.836.969.313	76.910.367.438
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.697.014.032)	4.807.496.753
<b>EKUITAS AKHIR</b>	E.5	<b>272.776.584.136</b>	<b>286.746.170.386</b>

***Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan***

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS UAPPA WILAYAH MALUKU BA. 005-01

*Dasar Hukum* UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01 didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Kebun Cengkeh Batu Merah Atas di Ambon.

Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01 mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon berkomitmen dengan visi ***“Mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

### **A.1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Semester I TA. 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01. Laporan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan UAPPA Wilayah Maluku BA.005-01 Semester I TA. 2020 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Pengadilan Tinggi Agama Ambon selaku Korwil yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Pengadilan Tinggi Agama Ambon sejak Tahun 2020 ini berjumlah 18 satuan kerja. Merupakan penambahan 7 Satker baru pada 4 Kabupatendengan Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

*Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA Wilayah Maluku  
BA.005.01*

<b>No.</b>	<b>Kode Wilayah</b>	<b>Nama Satker</b>	<b>Kode Satker</b>
1	2151	Pengadilan Tinggi Agama Ambon	402710
2	2151	Pengadilan Agama Ambon	307754
3	2101	Pengadilan Agama Masohi	307775
4	2152	Pengadilan Agama Tual	307761
5	2151	Pengadilan Tinggi Ambon	099691
6	2151	Pengadilan Negeri Ambon	099706
7	2101	Pengadilan Negeri Masohi	099710
8	2152	Pengadilan Negeri Tual	099727
9	2103	Pengadilan Negeri Saumlaki	672931
10	2151	Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon	539117
11	2151	Pengadilan Militer III-18 Ambon	663377
12	2104	Pengadilan Agama Namlea	401898
13	2106	Pengadilan Agama Dataran Hunipopu	401894
14	2107	Pengadilan Agama Dataran Hunimoa	401895
15	2104	Pengadilan Negeri Namlea	401930
16	2106	Pengadilan Negeri Dataran Hunipopu	401970
17	2107	Pengadilan Negeri Dataran Hunimoa	401971
18	2105	Pengadilan Negeri Dobo	401929

*Basis  
Akuntansi*

**A.2. Basis Akuntansi**

UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01 menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar  
Pengukuran*

**A.3. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01 dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan  
Akuntansi*

**A.4. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I TA 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan

(SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01 adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-  
LRA*

**(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-  
LO*

**(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara

proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### *Belanja*

#### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

### *Beban*

#### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## Aset

### (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

## Aset Lancar

### a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

### *Aset Tetap*

#### **b. Aset Tetap**

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
  - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

*Penyusutan  
Aset Tetap*

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang  
Jangka  
Panjang*

#### **d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset Lainnya*

#### **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (tahun)</b>
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

### *Kewajiban*

#### **(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

##### a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

##### b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## *Ekuitas*

### **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, UAPPA Wilayah Maluku BA. 005-01 telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan atau adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2020	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
<b>Pendapatan</b>		
Pendapatan Sewa	116.106.130	116.106.130
Pendapatan Administrasi	0	-
Pendapatan Bunga	0	-
Pendapatan Denda	0	-
Pendapatan Lain-lain	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>116.106.130</b>	<b>116.106.130</b>
<b>Belanja</b>		
Belanja Pegawai	6.455.003.000	6.455.003.000
Belanja Barang	2.709.560.000	2.439.260.000
Belanja Modal	25.000.000	25.000.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>9.189.563.000</b>	<b>8.919.263.000</b>

*Realisasi  
Pendapatan  
Rp182.101.855*

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 adalah sebesar Rp182.101.855 atau mencapai 156,84 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp116.106.130. **Pendapatan pada 4 Lingkungan Peradilan di Maluku** terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

#### *Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Sewa	116.106.130	182.101.855	156,84
Pendapatan Administrasi	-	-	-
Pendapatan Bunga	-	-	-
Pendapatan Denda	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>116.106.130</b>	<b>182.101.855</b>	<b>156,84</b>

Realisasi Pendapatan Perpajakan TA 2020 mengalami penurunan 45,38 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan persekot pegawai dan sebab-sebab lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsi pada 4 Lingkungan Peradilan di Maluku.

*Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Utang Kepada KUN	-	66.493.204	0,00
Pendapatan Sewa	116.106.130	111.045.000	0,00
Pendapatan Administrasi	-	-	0,00
Pendapatan Bunga	-	-	0,00
Pendapatan Denda	-	34.250.000	-100,00
Pendapatan Penjualan	-	-	0,00
Pendapatan Lain-lain	-	770.000	-100
<b>Jumlah</b>	<b>116.106.130</b>	<b>212.558.204</b>	<b>-45,38</b>

*Realisasi Belanja Negara Rp76.019.071.168*

**B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi pada Semester I TA 2020 adalah sebesar Rp76.019.071.168 atau 69,92 persen dari anggaran belanja sebesar Rp108.715.273.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja Semester I TA 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester I TA 2020*

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	81.693.269.000	59.448.860.695	72,77
Belanja Barang	24.839.004.000	15.307.419.373	61,63
Belanja Modal	2.183.000.000	1.262.791.100	57,85
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>108.715.273.000</b>	<b>76.019.071.168</b>	<b>69,92</b>
Pengembalian		-	-
<b>Jumlah</b>	<b>108.715.273.000</b>	<b>76.019.071.168</b>	<b>69,92</b>

Dibandingkan dengan TA 2019, Realisasi Belanja TA 2020 mengalami penurunan yaitu sebesar 1,43 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Realisasi anggaran belanja Tahun 2020 yang hampir mencapai sasaran.

*Perbandingan Realisasi Belanja TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	59.448.860.695	57.488.339.484	3,41
Belanja Barang	15.307.419.373	11.208.962.868	36,56
Belanja Modal	1.262.791.100	8.425.623.290	(85,01)
<b>Jumlah</b>	<b>76.019.071.168</b>	<b>77.122.925.642</b>	<b>(1,43)</b>

*Belanja Pegawai*  
*Rp59.448.860.695*

**B.2.1 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai Semester I TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp59.448.860.695 dan Rp57.488.339.484. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja Semester I TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,43 persen dari TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Berkurangnya mutasi dan penambahan pegawai dibanding dengan tahun sebelumnya.
2. Jumlah promosi jabatan lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya dikarenakan banyak jabatan yang telah terisi.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	57.959.348.897	56.450.826.809	2,67
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	1.502.240.000	1.035.480.000	45,08
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>59.461.588.897</b>	<b>57.486.306.809</b>	<b>3,44</b>
Pengembalian Belanja Pegawai	(12.728.202)	(6.967.325)	82,68
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>59.448.860.695</b>	<b>57.479.339.484</b>	<b>3,43</b>

*Belanja Barang*  
*Rp15.307419.373*

**B.2.2 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp15.307.419.373 dan Rp11.208.962. Realisasi Belanja Barang Semester I TA 2020 mengalami kenaikan 36,56% dari Realisasi Belanja Barang

TA 2019.

Hal ini antara lain disebabkan oleh meningkatnya anggaran belanja jasa. Serta meningkatnya realisasi perjalanan dinas.

*Perbandingan Belanja Barang TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	6.414.226.222	4.777.555.692	34,26
Belanja Barang Non Operasional	14.885.700	76.088.200	(80,44)
Belanja Persediaan	853.945.970	741.228.304	15,21
Belanja Jasa	3.120.856.694	1.570.940.945	98,66
Belanja Pemeliharaan	3.854.042.802	2.687.104.139	43,43
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.049.662.085	1.356.295.588	(22,61)
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>15.307.619.473</b>	<b>11.209.212.868</b>	<b>36,56</b>
Pengembalian Belanja	(200.100)	(250.000)	(19,96)
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>15.307.419.373</b>	<b>11.208.962.868</b>	<b>36,56</b>

*Belanja Modal  
Rp1.262.791.100*

**B.2.3 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.262.791.100 dan Rp8.425.623.290. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2020 mengalami penurunan sebesar 85,01% dibandingkan TA 2019 disebabkan oleh penambahan satker-satker baru yang berakibat peningkatan kebutuhan fasilitas kantor untuk menunjang terlaksananya pekerjaan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	762.460.000	3.702.102.405	(79,40)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	500.331.100	4.723.520.885	(89,41)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>1.262.791.100</b>	<b>8.425.623.290</b>	<b>-85,01</b>
Pengembalian	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.262.791.100</b>	<b>8.425.623.290</b>	<b>-85,01</b>

**B.2.3.a Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2020 adalah sebesar Rp762.460.000, mengalami penurunan sebesar 79,40 persen bila dibandingkan dengan

realisasi Tahun 2019 sebesar Rp3.702.102.405. Hal ini disebabkan karena kurangnya penambahan fasilitas pada gedung yang ditempati satker-satker baru pada tahun ini.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin  
TA 2020 dan 2019*

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	762.460.000	3.702.102.405	-79,40
Belanja Penambahan Nilai Peralatan & Mesin	0	0	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>762.460.000</b>	<b>3.702.102.405</b>	<b>-79,40</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>762.460.000</b>	<b>3.702.102.405</b>	<b>-79,40</b>

**B.2.3.b Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp500.331.100 dan Rp4.723.520.885. Realisasi Belanja Modal Semester I TA 2020 mengalami penurunan sebesar 844,08 persen dibandingkan Realisasi TA 2019. Hal ini disebabkan telah selesainya Pembangunan Gedung Satker-satker pada tahun 2019 lalu. Untuk tahun ini hanya satker Pengadilan Tinggi Ambon yang memiliki Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan  
TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			#DIV/0!
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	500.331.100	4.723.520.885	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>500.331.100</b>	<b>4.723.520.885</b>	<b>-844,08</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>500.331.100</b>	<b>4.723.520.885</b>	<b>-844,08</b>

**B.2.3.c Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Untuk Tahun 2019 sampai dengan 2020 tidak ada Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, disebabkan tidak adanya anggaran dalam DIPA pada 2 tahun terakhir.

**B.2.3.d Belanja Modal Lainnya**

Untuk Tahun 2019 sampai dengan 2020 tidak ada Realisasi Belanja Modal Lainnya, disebabkan tidak adanya anggaran dalam DIPA pada 2 tahun terakhir.

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di Bendahara  
Pengeluaran  
Rp492.071.000*

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2020 dan 30 September 2019 masing-masing adalah sebesar Rp492.071.000 dan Rp3.639.204. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Persediaan  
Rp16.607.700*

### C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 September 2020 dan 30 September 2019 masing-masing adalah sebesar Rp16.607.700 dan Rp10.099.900.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 30 September 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Persediaan TA 2020 dan 2019*

Jenis	TH 2020	TH 2019
Barang Konsumsi	16.607.700	10.607.700
Barang untuk Pemeliharaan		
<b>Jumlah</b>	<b>16.607.700</b>	<b>10.607.700</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tanah  
Rp88.118.763.000*

### C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah di lingkup 4 Peradilan di Wilayah Maluku per 30 September 2020 dan Desember 2019 adalah masing-masing sama yaitu sebesar Rp88.118.763.000. Tidak ada penambahan pada Tanah walaupun banyak Satker baru. Dikarenakan satker-satker tersebut belum memiliki aset Tanah.

Dari Jumlah di atas tidak ada yang dalam proses sengketa, dan tidak ada yang dihentikan penggunaannya karena

rusak/hilang atau dihapuskan.

*Peralatan dan  
Mesin  
Rp40.570.514.946*

#### **C.4 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 September 2020 dan Desember 2019 adalah Rp40.350.054.063 dan Rp40.659.083.878. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020</b>		<b>3.638.464.148</b>
<b>Mutasi tambah:</b>		
Pembelian		0
Koreksi saldo awal		0
Transfer Masuk		0
<b>Mutasi kurang</b>		
Transfer Keluar		0
<b>Saldo per 30 Juni 2019</b>		<b>3.638.464.148</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2019		3.381.346.488
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2019</b>		<b>257.117.660</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- Jumlah pembelian di atas diperoleh dari Pembelian Komputer pada satker-satker.
- Mutasi tambah dan kurang merupakan reklas masuk dan keluar.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp193.101.284.842*

#### **C.5 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 September 2020 dan Desember 2019 adalah sama yaitu Rp193.101.284.842. Tidak ada penambahan pada nilai pada Gedung dan Bangunan pada periode pelaporan 30 September 2020.

Rincian Gedung dan Bangunan disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini.

*Jalan, Jaringan dan  
Irigasi  
Rp1.048.400.900*

#### **C.6 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2020 dan Desember 2019 adalah sama yaitu Rp1.048.400.900,-. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang pada Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada

Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya*  
*Rp420.045.533*

### **C.7 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 September 2020 dan 2019 adalah sama yaitu sebesar Rp420.045.533. Tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai pada Aset tetap lainnya.

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan*  
*Rp500.331.100*

### **C.8 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)**

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 30 September 2020 dan Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp500.331.100 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung Kantor Pengadilan Tinggi Ambon yang proses pengerjaannya telah selesai pada bulan April 2020.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2020</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
Perolehan Penambahan KDP	0
Pengembangan KDP	500.331.100
Mutasi kurang:	
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	0
<b>Saldo per 30 Juni 2020</b>	<b>500.331.100</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
<b>Nilai Buku per 30 Juni 2020</b>	<b>500.331.100</b>

*Akumulasi Penyusutan Aset Tetap*  
*(Rp51.890.882.613)*

### **C.9 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 SEPTEMBER 2020 dan Desember 2019 adalah masing-masing (Rp51.890.882.613) dan (Rp48.199.884.179). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2020

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	16.436.567.000	0	16.436.567.000
2	Peralatan dan Mesin	3.638.464.148	-3.223.654.936	6.862.119.084
3	Gedung dan Bangunan	11.532.189.000	-632.742.408	12.164.931.408
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	197.279.000	-82.629.278	114.649.722
5	Aset Tetap Lainnya	31.932.520	0	31.932.520
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	500.331.100	0	500.331.100
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>32.336.762.768</b>	<b>-3.939.026.622</b>	<b>28.397.736.146</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud  
Rp73.500.000

### C.10 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sama yaitu senilai Rp73.500.000,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada UAPPA Maluku ada pada Satker Pengadilan Negeri Masohi senilai Rp5.000.000 dan Satker Pengadilan Tata Usaha Negara dan senilai Rp68.500.000 berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Aset Lain-Lain  
Rp3.112,724,080

### C.11 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 September 2020 dan Desember 2019 adalah Rp3,112,724,080 dan Rp2.828.683.114. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 1 Januari 2020</b>	<b>3.112.724.080</b>
<b>Mutasi tambah:</b>	
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Tetap Lainnya	-
<b>Mutasi kurang:</b>	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	-
Usulan Barang rusak berat ke Pengelola	-
Penggunaan Kembali BMN yang sudah dihentikan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>3.112.724.080</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	-
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>3.112.724.080</b>

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
(Rp2.204.333.252)*

### **C.12 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2020 dan Desember 2019 adalah masing-masing (Rp2.204.333.252) dan (Rp1.404.822.596). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 September 2020 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software			0
Aset Lain-lain	29.301.018	-29.301.018	0
<b>Jumlah</b>	<b>29.301.018</b>	<b>-29.301.018</b>	<b>0</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp335.000*

### **C.13 Utang kepada Pihak Ketiga**

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 September 2020 dan Desember 2019 masing-masing sebesar Rp335.000 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Nilai utang pihak ketiga ini merupakan Tagihan Air pada Satker Pengadilan Tata Usaha Negara yang belum dilunasi hingga tanggal pelaporan

*Uang Muka dari  
KPPN  
Rp492.071.000*

#### **C.14 Uang Muka dari KPPN**

Uang muka dari KPPN periode 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp492.071.000 dan Rp3.639.204. Uang muka dari KPPN merupakan nilai Uang Persediaan yang telah di pertanggungjawabkan/ direvolving per tanggal pelaporan. Nilai tersebut berada pada Kas di Bendahara Pengeluaran.

*Ekuitas  
Rp272.776.584.136*

#### **C.15 Ekuitas**

Ekuitas per 30 September 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp272.776.584.136 dan Rp275.473.598.168. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

*Pendapatan PNPB  
Rp131.474.680*

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp131.474.680 dan Rp187.740.684. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2020 dan 2019*

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa			-
Pendapatan Lain-lain	131.474.680	187.740.684	(29,97)
<b>Jumlah</b>	<b>131.474.680</b>	<b>187.740.684</b>	<b>(29,97)</b>

Pendapatan Jasa berasal dari pendapatan sewa tanah tanah, gedung dan bangunan serta pendapatan jasa giro. Sedangkan Pendapatan lain-lain berasal dari Pendapatan Denda dan pendapatan Biaya Leges.

*Beban Pegawai  
Rp59.228.947.856*

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Semester I Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp59.228.947.856 dan Rp57.359.919.899. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	20.496.005.513	20.628.857.888	(1)
Beban Tunjangan-Tunjangan	37.243.430.545	35.702.549.336	4
Beban Honorarium dan Vakasi	1.502.240.000	1.035.480.000	45
Beban Lembur dan Uang Makan	-	-	-
Pengembalian	-12.728.202	(6.967.325)	83
<b>Jumlah</b>	<b>59.228.947.856</b>	<b>57.359.919.899</b>	<b>3,26</b>

*Beban Persediaan  
Rp784.545.125*

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Semester I Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp784.545.125 dan

Rp695.175.759. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	781.545.125	695.175.759	12,42
Beban Persediaan Lainnya	3.000.000	0	100,00
<b>Jumlah Beban Persediaan</b>	<b>784.545.125</b>	<b>695.175.759</b>	<b>12,86</b>

*Beban Barang dan  
Jasa  
Rp9.273.084.231*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa Semester I Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp9.273.084.231 dan Rp6.268.614.780. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Barang Operasional	4.703.911.272	4.703.911.272	0,00
Beban Barang Non Operasional	14.885.700	76.088.200	-80,44
Beban Langganan Daya dan Jasa	3.005.296.892	1.485.715.308	102,28
Beban Jasa Pos dan Giro	0	0	#DIV/0!
Beban Jasa Konsultan	0	0	0,00
Beban Jasa Profesi	0	0	0,00
Beban Jasa Lainnya	4.970.000	2.900.000	71,38
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.729.063.864</b>	<b>6.268.614.780</b>	<b>23,30</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp3.916.915.944*

**D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Semester I Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp3.916.915.944 dan Rp2.737.484.954. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Penurunan beban pemeliharaan karena adanya penghematan pada pemeliharaan peralatan dan mesin. Rincian Beban

Pemeliharaan dapat dilihat sebagai berikut :

*Rincian Beban Pemeliharaan TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.202.026.690	1.477.627.084	49,02
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	498.809.080	107.380.409	364,53
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.153.207.032	1.102.096.646	4,64
Beban Persediaan bahan untuk Pemeliharaan	62.873.192	50.630.815	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.916.915.994</b>	<b>2.737.734.954</b>	<b>43,07</b>

*Beban Perjalanan Dinas  
Rp1.049.462.985*

**D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas Semester I Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.049.462.985 dan Rp1.356.295.588. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2020 dan 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2020	TH. 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Biasa	1.016.558.385	1.312.445.988	-22,54
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.587.000	33.875.000	-68,75
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	9.974.600	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	22.316.600	0	100,00
Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.049.461.985</b>	<b>1.356.295.588</b>	<b>-22,62</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp4.501.543.931*

**D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I Tahun 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.501.543.931 dan Rp3.814.702.090. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
TA 2020 dan 2019*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	1.858.562.097	1.528.740.602	22
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.601.945.516	2.254.788.735	15
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	14.083.290	14.083.291	(0)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	26.328.028	16.464.462	60
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>4.500.918.931</b>	<b>3.814.077.090</b>	18
Beban Amortisasi Software	625.000	625.000	-
Beban Amortisasi ATB Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	-	-
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	-
<b>Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>4.501.543.931</b>	<b>3.814.702.090</b>	18

## E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### *Ekuitas Awal*

*Rp275.473.598.168*

#### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp275.473.598.168 dan Rp281.938.673.633 yang merupakan akuitas akhir pada tahun sebelumnya.

### *Defisit LO*

*((Rp*

*78.524.030.220)*

#### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(78.524.030.220) dan Rp(72.100.463.749). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

### *Koreksi Lain-Lain*

*(Rp9.953.125)*

#### **E.3 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2020 dan 2019 adalah sebesar (Rp9.953.125) dan (Rp2.406.936). Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

### *Transaksi Antar*

*Entitas*

*Rp75.836.969.313*

#### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp75.836.969.313 dan Rp76.910.367.438. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

### *Ekuitas Akhir*

*Rp272.776.584.136*

#### **E.7 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 September 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp272.776.584.136 dan Rp286.746.170.386.

## **F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.**

### **F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal Neraca.

### **F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN**

1. 307754 – Pengadilan Agama Ambon Kls IA ; Terdapat kesalahan pembebanan akun pada Belanja Barang (52), dan telah dilakukan koreksi SPM setelah tanggal pelaporan yaitu 14 Juli 2020.
2. 307775 – Pengadilan Agama Masohi ; Terjadi perbedaan data antara SIAP dan SAI pada Estimasi Pendapatan disebabkan karena kesalahan petugas/operator dalam menginput estimasi pendapatan pada SAIBA.
3. 401894 – Pengadilan Agama Dataran Hunipopu ; Terjadi perbedaan data DIPA antara SIAP dan SAI, disebabkan adanya revisi Pagu yang selesai setelah tanggal neraca yaitu 1 Juli 2020, sehingga masih terbaca selisih sampai dengan tanggal pelaporan.
4. 099691 – Pengadilan Tinggi Ambon ; Selisih terjadi setelah e-rekon ditutup, sehingga Satker tidak dapat melakukan perbaikan. Kesalahan tersebut merupakan salah kode satker. Yang seharusnya input pada satker DIPA 03, ternyata salah diinput pada satker DIPA 01. Satker dalam proses melakukan perbaikan.

**LAPORAN PENDUKUNG  
CALK**